



DERI RIDWANSAH/RM

**DILANTIK:** Dari kiri Harry Azhar Azis bersama Wakil Ketua BP Supto Amal Dhamandari diambil sumpah saat pelantikan ketua BPK di kantor sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/10/2014). Pelantikan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah para menteri.

## BPK Perketat Opini Laporan Keuangan

**JAKARTA**—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal memperketat pemberian opini dalam penilaian laporan keuangan. Sebab, saat ini banyak lembaga yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) dari BPK, namun terjangkau korupsi.

Hal itu dikatakan Ketua BPK Harry Azhar Azis setelah membacakan sumpah jabatan di depan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial M. Saleh di Sekretariat MA, Jakarta, kemarin (28/10). Pembacaan sumpah kemarin juga dihadiri

Presiden Joko Widodo. Peraih gelar PhD bidang ekonomi dari Oklahoma State University tersebut mengakui, pemberian opini selama ini tidak mencerminkan kondisi lembaga pemerintahan yang diaudit. Bahkan, berkembang opini di masyarakat, penilaian BPK bisa diperjualbelikan. "Saya pribadi menilai itu kurang sreg. Nanti saya akan coba cari metode yang lebih baik," ujar mantan ketua umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.

Harry mencontohkan Kementerian ESDM dan Kementrian Agama yang sebelumnya menerima opini WTP, namun kenyataannya, menteri-nya sebagai pengguna anggaran malah terjerat korupsi. Belum lagi sejumlah kasus di pemerintah daerah. "Ada banyak yang dapat opini WTP, tapi gubernurnya dan wali kotanya ditangkap kasus korupsi. Oleh karena itu, pemberian opininya perlu diperketat," tuturnya.

Ada tiga agenda kerja yang akan dikedepankan mantan politikus Partai Golkar tersebut dalam memimpin BPK.

terian Agama yang sebelumnya menerima opini WTP, namun kenyataannya, menteri-nya sebagai pengguna anggaran malah terjerat korupsi. Belum lagi sejumlah kasus di pemerintah daerah. "Ada banyak yang dapat opini WTP, tapi gubernurnya dan wali kotanya ditangkap kasus korupsi. Oleh karena itu, pemberian opininya perlu diperketat," tuturnya.

Ada tiga agenda kerja yang akan dikedepankan mantan politikus Partai Golkar tersebut dalam memimpin BPK.

◆ Ke Halaman 8 Kolom 1



## BPK Perketat Opini

*Sambungan dari halaman 1*

Ketiganya adalah transparansi, tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, dan pembentukan unit pengaduan masyarakat.

Pembentukan unit pengaduan masyarakat itu penting untuk menindaklanjuti munculnya opini yang berkembang selama ini, yakni adanya jual beli hasil pemeriksaan laporan keuangan. "Dengan dibukanya unit pengaduan masyarakat, saya pun bisa Anda laporkan ke sana," ujarnya.

Harry mengaku sudah berbicara ke Jokowi untuk meminta waktu membahas pengelolaan keuangan negara. "Saya ingin mendiskusikan soal standar pengelolaan keuangan negara yang selama ini kerap tidak sama antara di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujarnya.

Menurut Harry, perlu ada standar pengelolaan keuangan negara yang sama dan bisa menghasilkan indikator kesejahteraan rakyat. Seperti pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia.

BPK sendiri sebenarnya tengah mendapatkan sorotan terkait banyaknya politikus yang menjadi pimpinan. Harry yang berlatar belakang politikus Golkar menjadi ketua BPK menggantikan Rizal Djalil yang sebelumnya juga merupakan mantan politikus Partai Amanat Nasional. Selain Harry dan Rizal Djalil, saat ini yang menjadi pimpinan BPK dari kalangan politisi adalah Achsanul Qosasi (Partai Demokrat).

Sejak UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK disahkan, sejumlah politikus berduyun-duyun menjadi pimpinan BPK. Di periode sebelum-sebelumnya, ada nama Ali Masykur Musa (PKB), T.M. Nurhif (Golkar), dan alm Herman Widiananda (Golkar). Banyaknya politikus yang menjadi pimpinan BPK tidak terlepas dari mekanisme rekrutmen pimpinan yang berbeda dibanding lembaga-lembaga lain.

Jika yang lain calon diajukan presiden atau dibantu tim independen untuk dimintakan persetujuan parlemen, untuk BPK, DPR adalah lembaga perekrut sekaligus yang memilih pimpinan lembaga auditor negara tersebut. Sejak itu para anggota DPR cenderung memilih kolega-koleganya sesama politisi.

Harry sempat geram ketika ditanya bagaimana dirinya menjaga independensi. "Saya bukan politisi. Saya bukan anggota partai. Berapa kali Anda tanya seperti itu?" cetusnya dengan nada tinggi kepada sejumlah wartawan.

Harry terpilih sebagai ketua BPK dalam sidang anggota BPK 21 Oktober lalu. Pria 58 tahun asal Tanjungpinang, Kepulauan Riau, itu mendapatkan lima suara dari sembilan anggota. Harry berhasil mengalahkan Rizal selaku *incumbent* yang hanya menuai empat suara. (gun/c9/sof)